



Waspadai Belanja Bansos untuk Pemilu

JAKARTA--Penyimpangan anggaran dana bantuan sosial (bansos) kerap menjadi "primadona" demi kepentingan pesta demokrasi. Indikasi bakal munculnya penyimpangan dana bansos kembali muncul menjelang Pemilu Legislatif 2014. Pada 2013 total anggaran bansos di sejumlah kementerian yang diisi tokoh partai politik sedikitnya berjumlah Rp 69,5 triliun, melonjak dari pagu anggaran yang sama pada 2012 yang berjumlah sekitar Rp 40 triliun.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menyatakan, anggaran bansos pada 2013 tersebar di 15 kementerian. Dibandingkan dengan total anggaran pada 2011 dan 2012, terjadi kenaikan yang

signifikan, terutama di kementerian tempat pejabatnya maju sebagai calon anggota legislatif ataupun memiliki keterkaitan dengan partai politik.

"Meningkatnya bansos kementerian tahun anggaran 2013 membuat kita harus mewaspadaikan adanya upaya politisasi bansos untuk kepentingan politik," ujar Dahlan dalam keterangan resminya kemarin (13/11).

Di antara 15 kementerian, kenaikan bansos paling signifikan terjadi di Kementerian Agama. Kementerian yang dipimpin ketua umum Partai Persatuan Pembangunan itu menganggarkan dana bansos untuk 2013 sebesar Rp 11,3 triliun. Jumlah tersebut berbeda jauh dengan pagu anggaran 2012, yakni hanya Rp 5,5 triliun.

Selain itu, ada kementerian

yang tidak menganggarkan dana bansos pada tahun anggaran 2011 dan 2012, namun memunculkan pos anggaran itu pada 2013. Kementerian Pemuda dan Olahraga "yang tidak menganggarkan dana bansos sebelumnya" saat ini memiliki anggaran bansos sekitar Rp 608,6 miliar.

Dahlan menyatakan, setidaknya ada sejumlah tolok ukur mengapa dana bansos pada 2013 patut dicurigai akan digunakan untuk kepentingan politik. Salah satunya, tahun ini berdekatan dengan Pemilu 2014. "Ditakutkan menjadi tahun di mana dana pemenangan pemilu dikumpulkan berbagai pihak, termasuk dengan membajak APBN," ujarnya.

Belanja bansos, lanjut Dahlan, juga rawan dipoliti-

sasi. Berbagai modus kerap dimunculkan demi manipulasi dana bansos. Program kegiatan yang tidak jelas dan tak berkelanjutan, pemberian kepada individu atau kelompok tertentu, serta penyerahan dana bansos disertai dengan kampanye terselubung adalah modus kegiatan yang rawan praktik manipulasi. "Apabila ini terjadi, tujuan mulia dana bansos praktis tidak terwujud," ujarnya.

Dahlan menambahkan, untuk menghindari kepentingan politik itu, pihaknya mendesak Kementerian Keuangan mengawasi penggunaan dana bansos secara ketat. Termasuk dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kementerian yang terkait. (bay/c10/fat)